

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGAWASAN PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMP NEGERI 05 RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh:

Fahmi Amri

Fahmi.amri94@gmail.com

Dosen Pembimbing: **Drs. Chalid Sahuri, MS**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761) 63277

ABSTRACT

FAHMI AMRI (1101136487). *The school Committee role in the oversight of School Operational Assistance Program (BOS) in the state Junior high school 5 Rupert of Bengkalis Regency. Guided by Drs. Chalid Sahuri, MS.*

The establishment of school Committee based on the decision of the Minister of national education Number 044/U/2002 as a standalone institution/agency story based on each unit of education aims to confront and channeling apirasi/community initiatives in the operational policy of the school to give birth as well as encouraging the role of the community. creating a transparent atmosphere. accountable, democratic and in organizing and educational services in the education unit. As part of organizing education, supervision and the school Committee role in the BOS program in educational units begins as the giver consideration and support for the preparation of the plan of activities of the school budget (RKAS) Fund BOS. Later, the school Committee also plays an active role in monitoring the BOS Programme implementation.

In this study, the theory concept is the theory advanced by supervision Brantas, explained that the oversight in an activity/program includes process sets the standard (the role). the Act assessment and conduct the stair steps of improvement. If there are deviations in order for the purpose of implementation and according to plan. The research method used is descriptive qualitative method of data collection instruments include observation, interviews. the study of library-related research objectives.

The research results show that the Committee role of State junior school 5 Rupert in oversight of Operational Assistance Program School (BOS) in the state Junior high school 5 Rupert of Bengkalis Regency has not run optimally. where the school Committee does not play a role in giving considerations compose RKAS and embody and encourage community participation in program activities of the BOS. The school Committee also did not perform the Act assessment on the implementation of the BOS programme with a plan that has been set. Consequently there is no corrective actions (correction) done School Committee.

Keywords: *Role Of The School Committee. Supervision. The BOS Program. RKAS*

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia secara formal diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta berkepribadian yang mantap, mandiri, rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, perlu adanya peranserta masyarakat serta dukungan finansial dalam mendorong warganya turut berperan serta dalam penyesuaian kondisi sosial dan budaya dimana pendidikan tersebut dilaksanakan. Salah satu input finansial yang diterima oleh sekolah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) Negeri terhadap biaya operasi sekolah.

2) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sedangkan besarnya biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

a) SD/SDLB : Rp. 580.000,-/Siswa/Tahun

b) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp. 710.000,-/Siswa/Tahun

Dana BOS yang diterima oleh sekolah, kemudian dikelola oleh organisasi pelaksana yang bernama Tim Manajemen BOS Sekolah yang terdiri dari penanggung jawab (kepala sekolah), bendahara BOS dan anggota satu orang dari unsur masyarakat diluar komite sekolah, dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah (Permendikbud No. 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2014).

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah, dimana komite sekolah sebagai sebuah badan/lembaga mandiri yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan. Pembentukan komite sekolah bertujuan untuk:

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional

dan program pendidikan di satuan pendidikan.

- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sedangkan tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan bersifat koordinatif. Dalam sistem pendidikan peran dan fungsi komite sekolah berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tersebut, komite sekolah mempunyai empat peran utama dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sedangkan fungsi komite sekolah (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002), yaitu:

- a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

- d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan dan Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RKAS).

- e) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

- f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Menurut Mulyono (2008) dalam penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat melalui komite sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat (komite sekolah) sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Masyarakat melalui komite sekolah dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya untuk memajukan pendidikan di daerahnya. Disamping itu, masyarakat melalui komite sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke sekolah.

Menurut Brantas (2009:195) pengawasan dalam suatu kegiatan atau program meliputi proses atau langkah-langkah sebagai yaitu:

- a) Menetapkan standar-standar kinerja yang akan digunakan dasar pengawasan.
- b) Menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

Selanjutnya Brantas (2009:191) menjelaskan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Suatu proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
- c) Supaya tujuan yang di hasilkan sesuai dengan rencananya.
- d) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- e) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- f) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
- g) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi.
- h) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i) Memberi opini atas kinerja organisasi.
- j) Mengerakkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-

masalah pencapaian kinerja yang ada.

- k) Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan, peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan Permendikbud tentang penggunaan dana BOS, dimulai dari pelaksanaan dana BOS yang diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu:

- 1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
- 2) Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
- 3) Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian dari integral tersebut.
- 4) Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

Selain peran penting komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu memberi pertimbangan atau sekolah harus memperhatikan pertimbangan komite sekolah dalam penyusunan RKAS yang bersumber dari dana BOS. Kemudian dalam pelaksanaan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh tim manajemen BOS sekolah yang menggunakan prinsip

keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa harus diketahui oleh komite sekolah (Permendikbud No.101:29).

Sehubungan dengan peran komite sekolah dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan, salah satu sekolah penerima dana BOS adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 05 Rupert yang terletak di kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis, dimana besarnya dana BOS yang diterima sebesar Rp.103.660.000 tahun 2013/2014 didasarkan pada jumlah siswa (146 Siswa) yang ada di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil observasi sementara terhadap peran komite sekolah dalam pengawasan dana BOS di SMP Negeri 5 Rupert, ditemukan berbagai fenomena sebagai berikut:

- a) Adanya indikasi bahwa dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dana BOS, SMP Negeri 5 Rupert komite sekolah tidak berperan dalam memberi masukan atau memberi pertimbangan terhadap penyusunan RKAS tersebut, komite sekolah hanya menandatangani RKAS sebagai formalitas.
- b) Tidak berjalannya hubungan koordinasi yang dilakukan oleh komite sekolah dengan satuan pendidikan (sekolah). Hal tersebut teridentifikasi dengan tidak diketahuinya skala prioritas penggunaan dana BOS bagi siswa miskin. Padahal, sebagaimana yang diatur oleh Kemendiknas No.044/U/2002 bahwa kewenangan komite sekolah dalam melakukan pengawasan berupa koordinasi, memberi pertimbangan dan masukan berkaitan dengan

kondisi sosial budaya masyarakat pada wilayah satuan pendidikan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran komite sekolah dalam pengawasan program BOS pada satuan pendidikan (SMP Negeri 5 Rupert). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada komite sekolah, guru sekolah (*purposive sampling*) dan masyarakat/wali siswa di satuan pendidikan menggunakan teknik *snowball sampling*. Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, selanjutnya dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan program BOS (*triangulasi data*).

HASIL

A. Peran Komite Sekolah Dalam Pengawasan Program BOS Di SMP Negeri 5 Rupert Kabupaten Bengkalis.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena:

- a. Dengan adanya pengawasan, suatu pekerjaan diharapkan dapat berjalan sesuai pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya
- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berpedoman pada teori Brantas (2009) dalam menjawab masalah penelitian, menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan atau program meliputi proses-proses sebagai berikut, yaitu:

- a. Menetapkan standar-standar kinerja (peran) yang akan digunakan dalam pengawasan.
- b. Menilai atau mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
- c. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

Berdasarkan kewenangan peran yang dimiliki komite sekolah dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah, dan kewenangan komite sekolah secara khusus dalam pelaksanaan program BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 101 tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana BOS.

1. Menetapkan Standar Komite Sekolah

Menetapkan standar peran yang digunakan dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan (program BOS) bertujuan untuk menggambarkan aktivitas ataupun peran-peran yang diatur dalam peraturan yang ada dan dijalankan. Apabila tidak ada standar yang telah ditetapkan, maka akan sulit untuk melakukan pengawasan, menggambarkan atau mengukur kualitas atau kuantitas peran komite sekolah sebagai sebuah badan/organisasi di satuan pendidikan.

Peran-peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan (program BOS) sebagaimana yang diatur dalam Kemendiknas No.044/U/2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah, adalah peran komite sekolah di satuan pendidikan berupa:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator dalam penyelenggaraan pendidikan dalam melahirkan atau menyusun kebijakan operasional sekolah.

Pemberi pertimbangan

Dalam program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tugas komite sekolah dalam menjalankan peran pemberi pertimbangan oleh komite sekolah diawali dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)

yang bersumber dari dana BOS yakni, berupa:

- a. Memberikan masukan atau pertimbangan untuk penyusunan RKAS.
- b. Menyelenggarakan rapat RKAS.
- c. Memberikan pertimbangan perubahan RKAS.
- d. Ikut mengesahkan RKAS bersama kepala sekolah.

Berdasarkan observasi dan wawancara penelitian diketahui bahwa penyusunan RKAS yang bersumber dari dana BOS telah melalui rapat/musyawarah tahunan program BOS, akan tetapi draf RKAS yang telah di susun oleh pihak sekolah tidak mengalami perubahan, komite sekolah tidak memberikan pertimbangan dan masukan pada draf RKAS, sehingga tidak mengalami perubahan sebelum disahkan. Komite sekolah mempercayakan penyusunan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Sekolah dari unsur guru atau pihak sekolah atau dengan kata lain komite sekolah dalam perannya sebagai pemberi pertimbangan tidak berjalan optimal atau tidak berperan aktif dalam menampung, mencari informasi, dan kemudian memberi pertimbangan dengan menyampaikan kebutuhan masyarakat/orang tua siswa pada satuan pendidikan (SMP Negeri 5 Rupert).

Pendukung (*supporting agency*)

Komite sekolah berperan sebagai badan pendukung (*supporting agency*) berupa dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu dalam perannya tersebut, komite sekolah berfungsi mendorong orang tua siswa

dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, mengalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan (Kemendiknas No. 044/U/2002).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian pada rapat program BOS, jika dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat/orang tua siswa yang menghadiri sosialisasi program BOS, maka dapat digambarkan bahwa peran komite sekolah dengan fungsinya memberi dukungan dengan mendorong masyarakat/orang tua siswa berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (Kepmendikbud No. 044/U/2002) belum berjalan optimal. Selain itu dukungan komite sekolah dalam bentuk pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan (SMP Negeri 5 Rupert) dalam penyusunan maupun pelaksanaan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 5 Rupert sangat lemah atau peran komite sekolah dalam mendukung kebijakan program BOS secara pemikiran maupun tenaga tidak berjalan optimal.

Pengontrol

Peran komite sekolah sebagai pengontrol Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Kemendiknas No.044/U/2002). Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi kegiatan dan proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan sehingga pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana BOS dapat dilaksanakan terbuka dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan wawancara dengan Tim Manajemen BOS Sekolah yang berasal dari unsur masyarakat, menggambarkan bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah telah disosialisasikan setiap tahunnya, serta dibahas secara terbuka dan transparan akan rencana penggunaannya. Namun peran komite sekolah dalam melaksanakan maupun mendorong (prinsip keterbukaan) dengan menyediakan informasi pelaksanaan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 5 Rupert dengan menginformasikan pada papan pengumuman pelaksanaan kegiatan dana BOS setiap kegiatannya yang dapat diakses masyarakat masih belum berjalan optimal.

Mediator

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam pengawasan program BOS di satuan pendidikan (SMP Negeri 5 Rupert) merupakan peran komite sekolah dalam melakukan mediasi antara satuan pendidikan maupun pemerintah dengan masyarakat terhadap kebutuhan dan mutu pendidikan bagi masyarakat di satuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian bahwa komite sekolah sebagai wakil masyarakat di satuan pendidikan (SMP Negeri 5 Rupert) belum optimal dalam melakukan mediasi terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di SMP Negeri 5 Rupert yang berkaitan dengan program BOS tersebut. Kepercayaan sepenuhnya komite sekolah terhadap

sekolah merupakan salah satu faktor tidak berjalanya mediasi oleh komite sekolah akan kebutuhan pendidikan bagi siswa atau prioritas tujuan penggunaan dana BOS bagi siswa miskin/ tidak mampu.

2. Tindakan Penilaian.

Tindakan penilaian terhadap program BOS di SMP Negeri 5 Rupert dilakukan guna untuk mengetahui atau mengecek kesesuaian antara Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang bersumber dari dana BOS dengan pelaksanaannya. Penilaian terhadap program BOS dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah atau memberikan pertimbangan atau masukan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Tindakan penilaian yang dilaksanakan oleh komite sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai bagian dari pengawasan masyarakat di satuan pendidikan (SMP Negeri 5 Rupert) dalam program BOS dalam bentuk pengawasan yaitu dapat berupa; 1) Pengawasan langsung (*Direct Control*), dengan melakukan penilaian berupa observasi langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. 2) Pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*), dengan melakukan tindakan penilaian secara tidak langsung. Penilaian ini dapat berbentuk tertulis dan laporan lisan lisan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian diketahui bahwa komite sekolah tidak pernah menerima ataupun meminta salinan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 5 Rupert yang akan dikirim sekolah tersebut ke dinas pendidikan setempat. Konsekuensinya, komite sekolah tidak pernah

memeriksa laporan tertulis apalagi melakukan klarifikasi terhadap data tersebut. Tidak ada salinan laporan tertulis yang dimiliki oleh komite sekolah juga menyebabkan tidak diketahuinya secara rinci realisasi penggunaan dana BOS tersebut, komite sekolah hanya menandatangani/ mengetahui format BOS K2 (rincian dana BOS secara umum).

Selain itu, tindakan penilaian pada laporan lisan/pengaduan masyarakat dalam pengawasan program BOS di satuan pendidikan (SMP Negeri 5 Rupert), dimana komite sekolah berperan aktif dalam mewadahi dan mencari tahu keluhan-keluhan masyarakat, diketahui bahwa laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap penggunaan dana BOS di SMP Negeri 5 Rupert sangat rendah atau dapat dikatakan tidak adanya pengaduan langsung dari masyarakat kepada komite sekolah.

3. Tindakan Perbaiki (Koreksi).

Tahapan pada tindakan perbaikan (koreksi) adalah upaya penyesuaian atas perbedaan, penyimpangan yang terjadi. Tujuan tindakan perbaikan ini adalah untuk mengembalikan status pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang disepakati atau standar. Perbaikan atas deviasi atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana atau program dapat dilakukan dengan menggambarkan ulang rencana atau dengan memodifikasi tujuan atau kepada orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut dilakukan penjelasan atas tanggung jawabnya.

Peran komite sekolah dalam melakukan tindakan perbaikan dalam memberikan pertimbangan

(rekomendasi) kepada sekolah dalam penyusunan kebijakan program BOS yang sedang berjalan atau program BOS selanjutnya dapat dilakukan apabila komite sekolah mengetahui secara rinci dan melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sedang berjalan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian terhadap program BOS di SMP Negeri 5 Rupert, menggambarkan bahwa komite sekolah tidak pernah melakukan tindakan perbaikan atau memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan yang sedang berjalan maupun kegiatan yang akan datang secara jelas. Hal tersebut disebabkan karena komite sekolah tidak pernah meminta atau menerima salinan laporan penggunaan dana BOS, dokumen dana BOS, baik itu dengan melakukan pengecekan ataupun mengklarifikasi kegiatan pembelian barang/jasa dengan laporan atau dokumen/laporan yang ada. Hal tersebut berakibat dan memiliki konsekuensi tidak adanya koreksi yang dilakukan atau peran komite sekolah dalam melakukan tindakan perbaikan tidak berjalan efektif/optimal.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Komite Sekolah Dalam Menjalankan Pengawasan Program BOS di SMP Negeri 5 Rupert.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komite sekolah sebagai sebuah organisasi atau badan pada satuan pendidikan berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran komite sekolah dalam pengawasan program BOS di SMP Negeri 5 Rupert kabupaten Bengkalis, antara lain; belum optimalnya kemampuan komite sekolah dalam bentuk sosialisasi dan kuantitas sosialisasi hanya diadakan

menjelang akan diadakannya rapat sosialisasi dan penyusunan RKAS yang bersumber dari dana BOS pada awal tahun dalam bentuk himbauan secara lisan dari warga ke warga lainnya di satuan pendidikan serta tidak adanya pembagian tugas antar komite sekolah.

Selain itu, pelatihan yang tidak diterima komite sekolah dan pengalaman yang dijalani komite sekolah memberikan nilai atau persepsi dalam menyikapi kewenangan (perturan/kejelasan tujuan) yang dipahami komite sekolah akan posisinya dalam penyelenggara pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan (program BOS).

Dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah, dan masyarakat pada satuan pendidikan dalam program BOS belum memadai. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan komite sekolah dalam kegiatan-kegiatan internal penyusunan dana BOS maupun dalam rapat atau kegiatan internal yang berhubungan dengan penggunaan dana BOS komite sekolah tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan atau komunikasi secara spesifik dengan masyarakat pada satuan pendidikan berkaitan dengan program BOS tersebut.

Faktor lainnya yaitu, dalam memberi sosialisasi berupa pengetahuan (pemahaman) mengenai program BOS kepada masyarakat berjalan tidak memadai, dimana tidak adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah hanya membantu sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah dalam jangka waktu

tertentu dan hal tersebut berakibat pada partisipasi masyarakat terhadap komite sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang peran komite sekolah dalam pengawasan program BOS di SMP Negeri 5 Rupert kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis, maka dapat disimpulkan bahwa Peran komite sekolah dalam pengawasan program BOS di SMP Negeri 5 Rupert belum sesuai dengan tujuan pembentukan komite sekolah (Kemendiknas No.044/U/2002) dan aturan pedoman program BOS belum berjalan optimal. Hal tersebut terbukti dengan tidak berjalannya standar (peran) komite sekolah yang telah ditetapkan (Kemendiknas No. 044/U/2002) dalam melaksanakan pengawasan program BOS, komite sekolah tidak berperan aktif dalam peran mewadahi, menyalurkan serta pemberi pertimbangan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dana BOS.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komite sekolah dalam pengawasan program BOS di SMP Negeri 5 Rupert antara lain, kemampuan komite sekolah dalam persepsinya mengenai kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Kemendiknas No.044/U/2002 dan Peraturan Pedoman Penggunaan Program BOS. Selain itu, minimnya hubungan koordinasi antara komite sekolah, komite sekolah dengan masyarakat dalam rangka mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, komite sekolah dengan pihak sekolah dan instansi pendidikan lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat serta

persepsi komite akan aturan program BOS dan kejelasan tujuan pembentukan komite sekolah sesuai Kemendiknas No.044/U/2002 belum memadai diterima komite sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktek)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Preneda Media Group. Jakarta.3
- Darwis. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen (Suatu Pengantar)*. Pekanbaru. UNRI.
- Fathony. 2005. *Organisasi dan Menejemen Sumber Daya Manusia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Handoko. T. Hani. 2003. *Menejemen*. BPFE.Yogyakarta.
- Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta Selatan. Penerbit. PT Grasindo.
- Jahari. J, Syarbini. A. 2013. *Manajemen Madrasah (Teori, Strategi dan Implementasi)*. Alfabeta. Bandung.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Lampiran II Tentang *Pembentukan Komite Sekolah*.
- Manulang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Makmur. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mulyono, M.A. 2008. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Nugroho. R. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Pasalong. Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional sekolah Tahun 2014*
- Robbin, P. Stephen. 2003. *Perilaku Organisasi*. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- _____, 2004. *Teori Organisasi*. Gramedia. Jakarta
- Sarwoto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jogjakarta. Penerbit Andi.
- Siagian. S.P. 2006. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Silalahi, Urbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Dan Konsep, Teori Dan Dimensi*. Bandung. Sinar Baru Algesindo.

- Siswanto, H.B. 2007. *Pengantar Menejemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sarundajang, H. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sutrisno, H.E. 2007. *Budaya Organisasi*. Kencana Pranadamedia Group. Jakarta.
- Terry, G.R. 2009. *Principles of Mnagment. Dasar-Dasar Mnajemen* (Terjemah: G.A Ticalu). Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Tilaar, H.A.R, Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan. Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Widodo. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedai Publishing. Jakarta
- Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.